

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS. (2014). *Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim*.
- BPJS Kesehatan. (2021). *Tugas dan Fungsi BPJS Kesehatan*. <https://widgetvoip-bpjs.netlify.app/>
- Carma, G. O. D. (2018). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terosisme di Bali*.
- Dian, & Arsyadi. (2016). *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan di Kota Padang*.
- Dwi Darmayanti, L., Budi Raharjo, B., Ilmu Kesehatan Masyarakat, J., Ilmu Keolahragaan, F., & Negeri Semarang, U. (2020). *824 HIGEIA 4 (Special 4) (2020) Higeia Journal Of Public Health Reserach and Development Keikutsertaan Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri*. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%204/38011>
- Eka Putri, A., Budiharto, M., & Komunitas Pejaten. (2014). *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Geniusman Komaini, A., Budi Sarwo dan Iyus Suhandi, Y. G., & Hukum Kesehatan, M. (2017). Aspek Hukum Pemberian Rekam Medis Guna Klaim Pembayaran Jaminan Pelayanan Kesehatan Peserta Multiguna Bagi Rumah Sakit di Kota Tangerang. In *Jurnal Hukum Kesehatan* (Vol. 3, Issue 2).
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1–1.
- Hariyanto, S. (2021). *Analisis Yuridis Pembukaan Rekam Medis Oleh Petugas BPJS Kesehatan Untuk Verifikasi Pembayaran Klaim*.
- HN Karima. (2020). *Perihal Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata dan Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan*.
- Kemenkes RI. (2016). *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*.
- Kemenkes RI. (2022). *Pengaruh Kelengkapan Rekam Medis Terhadap Klaim JKN*.
- Kumar, S., & Choudhury, S. (2021). Migrant workers and human rights: A critical study on India's COVID-19 lockdown policy. *Social Sciences and Humanities Open*, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100130>

- Lasut, E. T., Tamponggangoy, G. H., & Karwur, G. M. F. (2021). *Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Leonard, D., Fitriani, Y., Wijayanto, T., Senopati, A. R. S., Fajriati, A. P., Yolanda, E., & Sumiyati, S. (2021). Sosialisasi Pelaksanaan Sistem INA-CBGs di Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 842–846.
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.222>
- Lestari, D. N. (2019). *Analisis Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*.
- Masturoh, & Anggita. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. 244–246.
- Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Nurdin, N., Sos, S., Astika, M. A., Athahira, U., Stp, S., & Si, M. (2022). *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*.
- Panjaitan, A. A. (2020). *Analisis Pemanfaatan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia : A Literature Review*.
<https://doi.org/10.31573/jpab.v1i1.5>
- Pasal 4 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Pasal 19 UU No. 36 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Pasal 28H UUD 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*.
- Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Pasal 297 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Pasal 1365 KUHPperdata. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Pasal 1366 KUHPperdata. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Pasal 1367 KUHPperdata. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat 2. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 3. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 13 Ayat 5. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 16 Ayat 2. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 25. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 25 ayat 2. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 26. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 32. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 34. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 34 Ayat 1. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 39. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.*
- Permenkes No. 69 Tahun 2013 Pasal 1. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.*
- Perpres No. 82 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan.*
- PP No. 10 Tahun 1966 Pasal 3. (1996). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.*
- PP No. 32 Tahun 1996 Pasal 22. (1996). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.*

- Sa'diyah, D., & Ihsan, A. Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Membuka Rahasia Rekam Medis Pasien Covid-19 (Studi Kasus Dokter Jane S.P Rad) History Abstrak. In *Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 1).
- Safaat, M., & Tubagus, A. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Penggunaan Informasi Rekam Medis Pada Klaim Asuransi Kesehatan Di Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. R Ismoyo*.
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Suwignjo, A. H., & Mufid. (2019). *Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik Dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan*.
- Triwahyuningsih, S. (2018). *Legal Standing Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia* (Vol. 2, Issue 2).
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- UU No. 24 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- UU No. 29 Tahun 2004. (2004a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*.
- UU No. 29 Tahun 2004. (2004b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*.
- UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 46. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*.
- UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 46 Ayat 3. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*.
- UU No. 36 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009*.
- UU No. 36 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*.
- UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- UU No. 44 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*.
- UUD 1945 Amandemen Ke 2. (1945). *Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. (1945). *Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>

Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. 03–06.